

**STRATEGI PANGKALAN TNI AL DUMAI DALAM MENGHADAPI
PENYELUNDUPAN MANUSIA DI PERBATASAN LAUT DUMAI DAN SELAT
MALAKA**

**TNI AL DUMAI BASE STRATEGY TO CONFRONT OF PEOPLE SMUGGLING
ON THE DUMAI SEA BORDER AND THE MALACCA STRAIT**

Suryani,¹ Suhirwan,² Rudy A. G. Gultom³

Prodi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan
(suryani.9211@gmail.com)

Abstrak -- Pertahanan negara merupakan bagian dari fungsi pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional. Ancaman yang muncul di batas negara memperlihatkan adanya ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan negara. Penyelundupan manusia merupakan ancaman yang kini muncul di perbatasan negara dengan menjadikan Indonesia sebagai negara transit. Untuk mencapai tujuan pelaku penyelundupan menggunakan jalur laut untuk melaksanakan kegiatan penyelundupan manusia. Maraknya penyelundupan manusia yang menjadikan laut Dumai sebagai jalur penyelundupan manusia ke negara lain akan menjadi ancaman bagi Indonesia. Pangkalan TNI AL Dumai hadir dalam kegiatan pengamanan daerah perairan khususnya laut Dumai dan Selat Malaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dimiliki dan strategi yang digunakan oleh Pangkalan TNI AL Dumai dalam menghadapi ancaman penyelundupan manusia di perbatasan laut Dumai dan Selat Malaka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dan ilmu pertahanan, teori strategi, teori hambatan, teori pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan teori sinergitas untuk menjawab rumusan masalah. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi non-partisipan dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori hambatan untuk menentukan adanya faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi hambatan Pangkalan TNI AL Dumai dalam menghadapi penyelundupan manusia di perbatasan laut Dumai dan Selat Malaka. Pangkalan TNI AL Dumai menggunakan skala prioritas sebagai strategi untuk menentukan pola operasi/pengamanan yang dilakukan. Adanya penggunaan peran masyarakat sebagai informan dan sinergitas dengan *stakeholder* lainnya diharapkan dapat menjadikan implementasi strategi lebih efektif dan efisien.

Kata kunci: *pangkalan TNI AL Dumai, strategi, hambatan, peran masyarakat, sinergitas*

¹ Mahasiswa Pasca Sarjana, Program Studi Peperangan Asimetris, Universitas Pertahanan, Email: suryani.9211@gmail.com

² Wakil Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan, Email: suhirwan.23@gmail.com

³ Dosen Program Studi Peperangan Asimetris Universitas Pertahanan, Email: rudy.gultom@gmail.com

Abstract -- State defense is part of the governance function of a country that aims to achieve national goals. Threats that appear on the national borders show threats that can interfere with state sovereignty. Human smuggling is a threat that now appears on the borders of the country by making Indonesia a transit country. To achieve the purpose of smugglers using sea lanes to carry out human smuggling activities. The rise of people smuggling that makes Dumai sea as a route of people smuggling into other countries will be a threat to Indonesia. Navy Base Dumai is present in the security of the waters, especially the Dumai and Malacca Strait. This study aims to determine the obstacles and strategies used by the Indonesian Navy Base Dumai in the face of the threat of human smuggling at the Dumai and Malacca Strait sea borders. This study uses qualitative methods with phenomenological approaches, and defense science, strategy theory, obstacle theory, crime prevention and prevention theory, and synergy theory to answer the problem formulation. The data collection is done by interview method, non-participant observation and documentation. This study uses the theory of barriers to determine the existence of internal factors and external factors that become obstacles to the Navy Base Dumai in the face of human smuggling on the Dumai sea border and the Malacca Strait. Navy Base Dumai uses priority scale as a strategy to determine the pattern of operation / security that is carried out. The use of community roles as informants and synergy with other stakeholders is expected to make the implementation of strategies more effective and efficient.

Keywords: pangkalan TNI AL Dumai, strategy, obstacle, community role, synergy

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang berbatasan langsung baik dari darat maupun laut dengan beberapa negara tetangga, seperti Australia, Papua Nugini, Filipina, Brunai Darusalam, Singapura dan Malaysia.

Pada tahun 2003, Selat Malaka dilayari pada tiap harinya dengan barang angkutan yang berjumlah lebih dari sepuluh juta barrel yang dilewati oleh 19.154 buah kapal tangker ke arah timur (negara teluk Persia-Asia Timur).⁴

Dengan adanya aktivitas yang sangat padat di Selat Malaka menjadi kawasan ini sangat krusial karena sebagai jalur sempit yang menopang terlalu banyak kuota perdagangan dunia, yang sangat berpotensi timbulnya ancaman tindak kejahatan transnasional. Pada periode 2010-2014, peningkatan kejahatan transnasional perampokan terus meningkat,⁵ hal ini selaras dengan prediksi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) bahwa pada tahun 2018 di Indonesia terjadi adanya peningkatan jenis kejahatan transnasional atau tindak pidana yang melintasi batas

⁴ Mokhzani Zubir, *The Strategic Value of the Straits of Malacca*. (Maritime Institute of Malaysia (MIMA), 2006), hlm 1-19.

⁵ Muhammad Thorik Effendi. *Fenomena Peningkatan Transnasional Organized Crime Piracy di Selat Malaka Tahun 2010-2014*. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*. Vol 6 No.1, Januari 2017.

negara yaitu terorisme, peredaran gelap narkoba, perdagangan manusia, imigran gelap, penyelundupan senjata api, serta kejahatan siber. Meningkatnya kejahatan tanpa batas, bahkan antar lintas negara terjadi seiring dengan meningkatnya mobilitas warga antar Negara, yang berdampak pada meningkatnya mobilitas maupun modus kejahatan lintas negara.

Untuk mengatasi kejahatan transnasional di wilayah ASEAN, adanya kesepakatan bersama oleh 8 (delapan) negara anggota ASEAN yang meliputi: terorisme, perdagangan manusia (*human trafficking*), penyelundupan obat-obatan terlarang, pembajakan di laut, pencucian uang, kejahatan ekonomi Internasional, penyelundupan senjata, kejahatan dunia maya (*cybercrime*)⁶. Walaupun demikian, kejahatan transnasional di negara-negara ASEAN saat ini beraneka ragam, tapi yang paling mencolok adalah pencucian uang, narkoba, serta perdagangan manusia. Beberapa modus kejahatan lintas negara itu

antara lain perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal, pencucian uang, pornografi, kejahatan dunia maya (*cybercrime*), transfer pendanaan ilegal lewat bank, perdagangan obat terlarang, serta penyelundupan manusia (*people smuggling*)⁷.

Tingginya nilai geografis dan ekonomi di Selat Malaka selalu memunculkan ancaman keamanan disekitarnya. Kejahatan transnasional dalam bentuk penyelundupan manusia menjadi salah satu bentuk kejahatan yang menjadi fenomena saat ini, karena banyaknya pengungsi rohingya yang mencari suaka justru menjadi target penyelundupan apakah itu untuk diperjual belikan ataupun untuk menjadi pekerja ilegal.

Penyelundupan manusia dan imigran ilegal mempunyai keterkaitan satusama lain. Imigran ilegal berhasil masuk ke negara transit maupun negara tujuan tidak selalu membutuhkan kerjasama dengan para agen penyelundup, mereka juga dapat menyelundupkan dirinya sendiri ke

⁶Anonym, Kerjasama Politik Keamanan ASEAN, dalam <http://www.deplu.go.id>, diakses pada 3 November 2009.

⁷Anonim, Cegah Kejahatan Transnasional, Perbaiki payung Hukum, dalam <http://www.hukumonline.com>. Diakses pada 2 November 2009.

negara tujuan tanpa membutuhkan agen penyelundup. Penyelundupan manusia mengakibatkan semakin banyaknya jumlah imigran ilegal.⁸ Alasan yang sering kali diberikan oleh pelaku penyelundupan adalah untuk memperoleh pekerjaan atau kehidupan yang layak, peningkatan status ekonomi dan rasa aman dari konflik di negaranya.⁹

Di Indonesia, terutama pada pulau-pulau yang berada di wilayah perbatasan, pola imigrasi ilegal yang terjadi akhirnya berimplikasi pada munculnya masalah keamanan berupa aksi-aksi kejahatan yang melintasi batas negara, juga kejahatan transnasional yang terorganisir. Sehingga kejahatan yang dilakukan dengan melewati batas teritorial suatu Negara disebut kejahatan transnasional.¹⁰

Dumai sebagai kota yang berbatasan laut dengan Malaysia di

Selat Malaka tentunya menjadi daerah yang sangat rentan terhadap tindak kejahatan transnasional seperti penyelundupan manusia. Dikarenakan letaknya sangat strategis, menjadikan Dumai sebagai pintu masuk dan sekaligus jalur tikus untuk melakukan penyelundupan. Hal ini dapat dilihat Pangkalan TNI AL Dumai membawahi 9 (sembilan) pos yang tersebar di pesisir pantai provinsi Riau yang terbentang dari Pulau Panipahan yang terletak di Rokan hilir hingga ke Pulau Jambi yang terletak di perbatasan Provinsi Riau Jambi¹¹ sebagai bentuk antisipasi dan mempermudah pengawasan terhadap daerah perbatasan lautnya. Dikarenakan letak geografis Kota Dumai yang strategis di Selat Malaka maka sangat berpotensi menjadi jalur persinggahan tindak kejahatan transnasional.¹² Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tindak kejahatan yang

⁸ Kadarudin, *People Smuggling dalam perspektif Hukum Internasional dan Penegakan Hukumnya di Indonesia*. (Jurnal Perpustakaan, Informasi dan Komputer Jupiter, Volume XII Nomor 2 Edisi Juni, 2013), hlm. 69-70.

⁹ Sam Fernando, *Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia*, (Jurnal Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2013), hlm. 4.

¹⁰ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, "Transnational organized Crime Crime Membayangi", Buletin berkala LPSK Edisi No. III, 2012, hlm. 5

¹¹ Hasil wawancara bersama PasOps Pangkalan TNI AL Dumai yang dilaksanakan pada 28 Mei 2018 di Pangkalan TNI AL Dumai.

¹² Anonim, "kondisi geografis kota Dumai" dalam <http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/04/08/narkoba-serbu-dumai-komandan-Pangkalan>

berhasil diamankan oleh Pangkalan TNI AL Dumai di perairan Selat Malaka yang menuju daerah laut Dumai ataupun sebaliknya.

Lalu lintas perdagangan dan pelayaran internasional di selat malaka yang merupakan salah satu rute tersibuk sehingga banyak ditemukan ancaman maritim seperti bajak laut, perompak, dan berbagai aksi kriminalitas di laut. Hal ini tentunya menjadi tugas dari TNI AL untuk mendeteksi, menangkal dan menangani berbagai ancaman maritim agar terciptanya rasa aman dan nyaman di wilayah Indonesia. Tugas tersebut dipikul oleh TNI AL dalam mempertahankan wilayah Indonesia di laut sehingga diperlukan wawasan maritim yang mumpuni dan luas untuk menangani berbagai permasalahan dan kompleksitas ancaman di wilayah perairan Indonesia.

Berkenaan dengan TNI, melalui Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 10, Ayat 3 dibahas cakupan tugas TNI dalam pertahanan

negara, Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk:

- a. Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah
- b. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa
- c. Melaksanakan Operasi Militer Selain Perang
- d. Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Pangkalan TNI AL Dumai mempunyai tanggung jawab besar terhadap perbatasan laut Dumai dan Selat Malaka untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan tersebut mengingat Pangkalan TNI AL Dumai menjadi satu-satunya TNI AL yang ada di wilayah provinsi Riau.

Berdasarkan Trinitas Angkatan Laut yang diadopsi dari Ken Booth yaitu *military*, *diplomacy*, dan *policioner*.¹³ Adapun salah satu tugas dari TNI AL adalah melakukan penegakan hukum terbatas di laut. Kejahatan yang dapat ditangani oleh TNI AL meliputi pelayaran, perikanan dan eksploitasi

TNI AL-akui-pengawasan-laut-tak-maksimal diakses pada 20 Juni 2018 pukul 10.42 WIB.

¹³ Ken Booth, *Navies and Foreign Policy*, (Holmes and Meier Publishers Inc., New York, 1979), hlm. 15-25.

sumber daya alam, hal tersebut tentu saja membatasi ruang lingkup penegakan hukum di laut bagi TNI AL mengingat patroli dan pengamanan yang dilakukan di laut sering menemui tindak pidana lainnya seperti penyelundupan sehingga hanya bisa melakukan penangkapan tanpa adanya tindakan keberlanjutan yang dapat dilakukan TNI AL terhadap kejahatan tersebut, karena kurangnya informasi yang diperoleh dari satuan samping menyebabkan Pangkalan TNI AL Dumai tidak mengetahui akhir dari tindakan kejahatan tersebut. Hal tersebut juga berlaku bagi penangkapan dan pengamanan yang dilakukan oleh Pangkalan TNI AL Dumai terhadap pelaku penyelundupan manusia yang kemudian diserahkan kepada pihak keimigrasian.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana hambatan yang dihadapi dan strategi Pangkalan TNI AL Dumai dalam menghadapi ancaman penyelundupan manusia dan strategi Pangkalan TNI AL Dumai?.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis

hambatan yang dihadapi dan strategi Pangkalan TNI AL Dumai dalam menghadapi ancaman penyelundupan manusia di perbatasan laut Dumai dan Selat Malaka.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara, observasi non partisipan dan studi dokumentasi. Selain itu untuk teknik pengambilan data, peneliti menggunakan sampel *purposive* dari Creswell yaitu memilih individu-individu dan tempat untuk diteliti karena mereka dapat secara spesifik

Hasil dan Pembahasan

Pertahanan negara merupakan segala upaya dalam menghadapi ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan kepada keutuhan negara guna menjaga keselamatan bangsa beserta keutuhan wilayah dan kedaulatan negara.

Strategi merupakan hal yang penting bagi kelangsungan hidup dari suatu organisasi untuk mencapai

sasaran atau tujuan organisasi yang efektif dan efisien dalam menghadapi setiap permasalahan atau hambatan yang datang dari dalam maupun dari luar organisasi. Menurut Drew, strategi sebagai proses pengambilan keputusan yang kompleks yang menghubungkan *the ends* (tujuan), *means* (sumber daya), dan *ways* (cara) yang akan digunakan dalam mencapai tujuan.

Menurut Poerwandarminta, hambatan merupakan sebuah halangan, rintangan atau suatu keadaan yang tidak dikehendaki atau disukai kehadirannya, menghambat perkembangan seseorang/ organisasi. Menurut M. Syah, adapun faktor penyebab timbulnya hambatan terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal.

Menurut Freeman, pencegahan terdiri atas prekdisi (*prediction*) dan intervensi (*intervention*). Sedangkan tujuan akhir dari penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman, dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Sinergi menurut Najiyati dan Rahmat merupakan kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Sinergitas dapat dibangun melalui komunikasi dan koordinasi.¹⁴

Imigrasi bukan hanya terbatas pada aspek perpindahan penduduk tanpa melihat aspek-aspek lainnya. Imam Mengatakan adanya dua pola arus imigrasi berdasarkan modus operandinya, yaitu: arus imigrasi dengan pola legal/sah dan arus imigrasi dengan pola yang ilegal/tidak sah.¹⁵

Adapun penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Pangkalan TNI AL Dumai. Pangkalan TNI AL Dumai berada di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai Provinsi Riau. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 9, Pangkalan TNI AL yang merupakan bagian dari TNI AL menyelenggarakan tugas: melaksanakan tugas TNI matra laut di

¹⁴ Sri Najiyati dan S. R. Topo Susilo, "Sinergitas Instansi Pemerintah dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (*The Synergy of Government Institutions in The*

Transmigration Urban Development", *Jurnal Ketransmigrasian*, 2011, hlm. 113-124

¹⁵ M. Imam Santoso, *Diaspora Globalisme, Keamanan dan Keimigrasian*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), hlm. 2

bidang pertahanan; menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah; melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Adapun Fungsi dari Pangkalan TNI AL Dumai sesuai petunjuk kerja yang berdasarkan surat keputusan Komandan Lantamal I Belawan Nomor Skep/24/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Pokok-pokok dan Prosedur Pangkalan TNI AL Dumai yaitu:

1. Menyusun dan melaksanakan program pembinaan kemampuan Pangkalan TNI AL Dumai Dumai beserta sarana dan prasarana pendukung berdasarkan rencana dan program kerja Komandan Lantamal I;
2. Mengurus kepentingan TNI AL dalam hubungannya dengan badan atau instansi terkait setempat;
3. Menyediakan fasilitas perawatan personil bagi pengawak kapal/ABK dan tamu lainnya maupun personil di lingkungan Pangkalan TNI AL Dumai Dumai;
4. Menyiapkan tempat penyimpanan/gudang untuk menunjang kegiatan dukungan bekal kepada personil Pangkalan TNI AL Dumai Dumai/maupun tamu TNI AL;
5. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan komando, badan dan instansi terkait baik di dalam maupun di luar lingkungan Pangkalan TNI AL Dumai untuk kepentingan pelaksanaan tugas pokok;
6. Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja Pangkalan TNI AL Dumai guna menjamin pencapaian sasaran programnya secara berhasil guna dan berdaya guna;
7. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Danlantamal I khususnya mengenai hal-hal yang

berhubungan dengan bidang tugasnya.

Pangkalan TNI AL Dumai memiliki wilayah kerja yang sangat luas, yaitu terbentang diseluruh kawasan Provinsi Riau. Sebagian besar masyarakat memahami bahwa Pangkalan TNI AL Dumai hanya dimiliki oleh masyarakat Dumai saja, pada kenyataannya Pangkalan TNI AL Dumai milik seluruh warga provinsi Riau, hanya saja bertepatan dengan posisi geografis di kota Dumai. Peta provinsi Riau memperlihatkan bahwa adanya garis pantai yang sangat panjang dimiliki provinsi Riau yaitu 20.765,5 Km (Kilometer).¹⁶

Hambatan yang dihadapi Pangkalan TNI AL Dumai tentunya sangat mempengaruhi efektivitas kinerja Pangkalan TNI AL Dumai. Beberapa indikator yang terdapat pada kendala tersebut adalah: 1) faktor internal; 2) faktor eksternal.¹⁷

Dari hasil pengumpulan data melalui wawancara, dan didukung dengan pengumpulan data melalui

observasi tidak langsung serta studi dokumentasi, maka diperoleh hasil evaluasi untuk setiap indikator tersebut, yaitu:

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam diri kelompok/organisasi itu sendiri.¹⁸ Adanya beberapa faktor internal yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Adapun hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki Pangkalan TNI AL Dumai terletak pada jumlah personil yang terbatas dan hanya memenuhi 52% dari ketentuan 100% yang terdapat pada DSP, serta adanya rangkap jabatan oleh beberapa perwira agar pelaksanaan tugas harian dapat tetap berjalan. Adanya rangkap jabatan tersebut, menjadikan kinerja tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Sedangkan dari

¹⁶ Dinas Perhubungan Provinsi Riau, *Garis Pantai Riau*, (Pekanbaru: 6 September 2018),

¹⁷ M. Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 56.

¹⁸ *Ibid*,

segi kualitas, personil Pangkalan TNI AL Dumai sudah mampu menguasai dan menjalankan tugas pokok dan keseharian, serta bagi personil yang memiliki kemampuan terbatas, dipersilahkan untuk mengikuti pelatihan guna meningkatkan *capability* personil tersebut.

b. Alutsista

kendala pada ketersediaan alutsista yang dimiliki dan teknologi yang digunakan adalah keterbatasan alutsista yang dimiliki oleh Pangkalan TNI AL Dumai. Keterbatasan tersebut terletak pada jumlah dan jenis alutsista yang dimiliki seperti kecepatan KAL dan Patkamla yang berkecepatan hanya 200 PK dan masih tertinggal dari yang sering digunakan pelaku tindak kejahatan yang berkecepatan mencapai 1000 PK. Selain itu, AIS yang dimiliki Pangkalan TNI AL Dumai hanya berjumlah dua buah dan tidak berfungsi yang dimana AIS sangat membantu untuk mendeteksi kapal-kapal yang melewati perairan Dumai dan

Selat Malaka. Akan tetapi untuk menutupi kekurangan jumlah alpung, Pangkalan TNI AL Dumai menggunakan kapal hasil tangkapan yang masih menunggu proses hukum dan tidak memiliki pro justisia untuk membantu pencegahan dan penggiringan terhadap kapal pelaku kejahatan

C. Logistik

Kendala bagi Pangkalan TNI AL Dumai selain sumber daya manusia dan alutsistaa/teknologi adalah pada ketersediaan logistik. Seringnya pengajuan kebutuhan dan anggaran dengan yang diberikan tidak sesuai, serta kebutuhan bahan bakar bensin hanya diberikan untuk kendaraan di darat saja dan kendaraan laut diberikan bahan bakar solar sedangkan kendaraan laut yang digunakan menggunakan bahan bakar bensin. Adapun satuan samping seperti Satpol air Dumai hanya melakukan patroli di sepanjang garis pantai Dumai dan hanya melakukan patroli selama 2 (dua) jam setiap harinya sehingga *joint patrol* sulit untuk dilakukan.

2) Faktor Eksternal

faktor eksternal yang menjadi hambatan yaitu kondisi geografis, faktor cuaca (gelombang ombak tinggi, hujan dan badai, angin kencang, petir), pasang surut air laut, kesadaran masyarakat, kekuatan hukum penanganan bagi TNI AL, moral masyarakat, perpres No. 21 Tahun 2016 tentang bebas visa dan mudahnya akses untuk memasuki wilayah Indonesia, serta kondisi/situasi/musim negara asal pelaku penyelundupan.

Penelitian terdahulu oleh Marsetio bahwa patroli keamanan laut menghadirkan kapal-kapal perang RI (KRI) di seluruh perairan Indonesia, termasuk di pulau-pulau terpencil, selain dimaksudkan untuk melaksanakan patroli rutin dalam rangka penegakan keamanan di laut, juga dimaksudkan untuk menunjukkan kesungguhan negara dalam mempertahankan negara. Namun kegiatan *show of flag* tidak hanya diartikan sebagai tindakan koersive tetapi merupakan *naval diplomacy* merupakan cerminan

politik dan kebijakan luar negeri Indonesia.

Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Thorik Efendi bahwa terdapat beberapa faktor yang berkaitan menjelaskan kemunculan *piracy* di Selat Malaka, yaitu 1) *poor governance*; 2) *poor socio economic conditions*; 3) perpaduan teknologi dan geografi. Faktor teknologi dan geografis telah meningkatkan peluang bagi bajak laut dan perampok laut dalam beberapa tahun terakhir. Penjahat maritim khususnya anggota kejahatan terorganisir yang memiliki kelompok serta akses yang mudah untuk mendapatkan kapal berkecepatan tinggi, navigasi satelit, ponsel dan internet serta senajata. Pada geografis, akses yang sama juga didapat seperti saluran air yang sempit, pulau kecil, dan akses sungai dengan lingkungan kondusif untuk mengeksploitasi kemampuan teknologi.

Hambatan tidak terlepas dari adanya faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi, sehingga hambatan yang banyak

menghambat Pangkalan TNI AL Dumai dalam menghadapi penyelundupan manusia tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan.

Adapun strategi yang digunakan untuk menghadapi penyelundupan manusia di perbatasan laut Dumai dan Selat Malaka oleh Pangkalan TNI AL Dumai adalah membuat skala prioritas (mengetahui lingkungan strategis, pasang surut air laut, dan jalur masuk tikus), kerjasama informasi, penggunaan intelijen, dan informasi dari masyarakat.

Berdasarkan strategi yang dirumuskan, membuat skala prioritas ancaman dengan menganalisis lingkungan strategis dan ancaman yang muncul sangatlah tepat. Hal ini telah diimplementasikan oleh Pangkalan TNI AL Dumai untuk menghadapi tindak kejahatan di laut. Dengan menganalisis wilayah yang dianggap rawan berdasarkan tindak kejahatan yang pernah dilakukan, diharapkan dapat menjadi panduan dalam melaksanakan patroli, serta memberikan prioritas

pengawasan terhadap kawasan tersebut. Selain patroli yang dijadikan prioritas, juga meletakkan personil yang bertugas juga dalam porsi yang lebih dari pada daerah yang memiliki kerawanan rendah. Hal tersebut sesuai dengan teori strategi menurut Chandler bahwa alat untuk mencapai tujuan organisasi dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya.¹⁹ Kelebihan dari strategi ini adalah pengawasan dilakukan terhadap daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi sehingga diharapkan setelah adanya prioritas pengawasan dan patroli di kawasan tersebut dapat meminimalisir tindak kejahatan. Akan tetapi strategi ini juga memiliki kekurangan/kelemahan yaitu dengan adanya prioritas pengawasan dan patroli di daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, maka pengawasan akan melemah di daerah yang kerawanannya rendah, hal tersebut juga dianggap kurang efektif karena dengan adanya pengawasan yang biasa terhadap daerah tersebut dapat

¹⁹ Nainggolan dalam Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknis Membedah Kasus Bisnis*,

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998) hlm. 3-4.

dijadikan pelaku kejahatan sebagai jalan keluar, karena banyaknya personel yang ditempatkan di daerah yang memiliki kerawanan tinggi dapat mengganggu kemudahan, kelancaran dapat menggagalkan rencana yang telah dibuat karena dapat ditangkap oleh Pangkalan TNI AL Dumai. Serta jika dihadapkan pada jumlah personel dan sarana prasarana yang tersedia, maka sangat sulit untuk mengatur jadwal patroli menggunakan alpung dan jumlah personel.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada penelitian ini ditemukan adanya hambatan yang dimiliki Pangkalan TNI AL Dumai dalam menghadapi penyelundupan manusia di perbatasan laut Dumai dan Selat Malaka yang terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang dimiliki Pangkalan TNI AL Dumai yaitu kurangnya jumlah personel yang dihadapkan dengan wilayah kerja yang luas, keterbatasan alutsista/teknologi yang dimiliki serta jumlah logistik yang terbatas. Sedangkan hambatan yang bersumber dari faktor eksternal adalah kondisi

geografis, faktor cuaca (gelombang tinggi, hujan dan badai, angin kencang, dan petir), pasang surut air laut, kesadaran masyarakat, kekuatan hukum penanganan bagi TNI AL, Perpres No 21 Tahun 2016 tentang Bebas visa dan kemudahan akses masuk ke Indonesia serta kondisi/situasi musim negara asal pelaku penyelundupan.

Adapun strategi yang dimiliki Pangkalan TNI AL Dumai dalam menghadapi penyelundupan manusia dilihat pada teori strategi yaitu *ends* yang bertujuan untuk meminimalisir praktik penyelundupan manusia di perbatasan laut Dumai dan Selat Malaka, *means* dengan menggunakan sumber daya yang ada pada Pangkalan TNI AL Dumai yaitu kekuatan yang solid antara manusia dan *software*, penguasaan wilayah, penempatan personel, semangat, dedikasi dan loyalitas prajurit, dukungan masyarakat serta koordinasi dengan instansi lainnya, serta *ways* dengan membuat skala prioritas patroli atau pengawasan dengan menganalisis lingkungan strategis dan ancaman yang muncul, memperhitungkan kondisi alam seperti

waktu pasang surut air laut, gelombang besar dan tinggi, angin kencang, penggunaan intelijen untuk mengumpulkan informasi yang ada di lapangan serta mengikutsertakan masyarakat sebagai informan. Keikutsertaan masyarakat pesisir sebagai informan bagi Pangkalan TNI AL Dumai telah memperlihatkan adanya kesadaran dan ketertiban yang nyata dari masyarakat sebagai bentuk pencegahan, selain itu diperlukannya sinergitas antara Pangkalan TNI AL Dumai bersama satuan samping untuk melaksanakan Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) dan Tim POA (Pengawasan Orang Asing) yang dilakukan dengan koordinasi.

Saran/Rekomendasi

Adapun hal yang dapat menjadi rekomendasi untuk peneliti selanjutnya adalah dengan melakukan analisis pembentukan WFQR di Pangkalan TNI AL Dumai.

Daftar Pustaka

- Anonim. “Cegah Kejahatan Transnasional, Perbaiki payung Hukum”, dalam <http://www.hukumonline.com>, diakses pada 2 November 2009
- Anonim. “Kerjasama Politik Keamanan ASEAN”, dalam <http://www.deplu.go.id>, diakses pada 3 November 2009
- Anonim. “kondisi geografis kota Dumai”, dalam <http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/04/08/narkoba-serbudumai-komandan-Pangkalan-TNI-AL-akui-pengawasan-laut-tak-maksimal>, diakses pada 20 Juni 2018 pukul 10.42 WIB
- Booth, Ken. 1979. *Navies and Foreign Policy*. Holmes and Meier Publishers Inc., New York.
- Fernando, Sam. 2013. “Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia”. *Jurnal Pascasarjana Universitas Brawijaya*.
- Imam Santoso, M. 2014. *Diaspora Globalisme, Keamanan dan Keimigrasian*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Kadarudin. 2013. “People Smuggling dalam perspektif Hukum Internasional dan Penegakan Hukumnya di Indonesia”. *Jurnal Perpustakaan Informasi dan Komputer Jupiter*. Volume XII Nomor 2 Edisi Juni.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 2012. “Transnational organized Crime Crime Membayangi”. *Buletin berkala LPSK Edisi No. III*.
- Najiyati, Sri dan S. R. Topo Susilo. 2011. “Sinergitas Instansi Pemerintah dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (The Synergy of Government Institutions in The

- Transmigration Urban
Development”. *Jurnal*
Ketransmigrasian.
- Rangkuti, Freddy. 1998. *Analisis SWOT Teknis Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syah, M. 2008. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Thorik Effendi, Muhammad. 2017. “Fenomena Peningkatan Transnasional Organized Crime Piracy di Selat Malaka Tahun 2010-2014”. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*. Vol 6 No.1.
- Zubir, Mokhzani. 2006. “The Strategic Value of the Straits of Malacca”. Maritime Institute of Malaysia (MIMA).

